



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan kinerja pada laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015, Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bima, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2015 yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Bima Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2015, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

2.1. **Visi dan Misi Kabupaten Bima**

Visi Pemerintah Kabupaten Bima secara prinsip adalah upaya mewujudkan pembangunan masyarakat yang lebih baik, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dengan berdasar pada nilai-nilai hakiki yang menjadi fondasi kehidupan dalam masyarakat seutuhnya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bima adalah :

**"Terwujudnya Masyarakat dan Daerah Kabupaten Bima Yang Maju,
Mandiri Dan Bermartabat Berdasarkan Nilai Maja Labo Dahu
Yang Reliqius Tahap Kedua".**

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. **Masyarakat dan daerah Kabupaten Bima** adalah seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bima yang berada di wilayah Kabupaten Bima.
2. Kabupaten Bima yang **maju** ditandai dengan adanya kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan lahir dan batin. Aspek lahiriah, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Aspek batiniah ditandai dengan meningkatnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pembangunan daerah, semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat, serta



meningkatnya ketahanan sosial budaya. Kedua kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan *Crime Index*. Reaksi-reaksi sosial kemasyarakatan perlu ditanggapi dan dijadikan sebagai salah satu perwujudan rasa keadilan masyarakat. Pengukurannya dapat digunakan indikator seperti: tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal usaha produktif bagi masyarakat.

3. Kabupaten Bima yang **mandiri** ditandai dengan peningkatan kapasitas penalaran dan fisik manusia yang diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Rasio Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah terhadap penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.
4. Kabupaten Bima yang **bermartabat** ditandai dengan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkepribadian luhur dalam segala aspek kehidupan.
5. Nilai **Maja Labo Dahu** merupakan falsafah hidup masyarakat Bima dalam menerapkan norma-norma kemasyarakatan dan keagamaan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan manusia, yaitu malu jika berbuat kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma yang ada dan takut kepada Allah sehingga selalu berusaha keras agar mampu menjadi manusia terbaik dalam hidup. Disamping itu, konsepsi **Maja Labo Dahu** mengandung 4 nilai luhur yaitu: **Toho ra ndai sura dou labo dana, Toho ra ndai sura dou marimpa, Renta ba rera kapoda ba ade karawi ba weki, Nggahi rawi pahu;**
6. Nilai **Religius** dimaknai sebagai adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama, dimana Islam yang merupakan agama mayoritas di wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kerukunan hidup dengan umat beragama lain. Peningkatan aspek batiniah dilaksanakan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pembangunan daerah dan semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan berkurangnya tingkat kriminalitas pada masyarakat dalam berbagai bentuk, terciptanya keamanan dan ketertiban, serta terciptanya situasi kondusif untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.
7. **Tahap Kedua**, artinya masa pemerintahan yang diemban oleh Bupati H. Ferry Zulkarnain, ST. Dengan wakil Bupati Drs.H.Syafudin H.M.Nur untuk tahun 2011 - 2015 merupakan tahap yang ke-II sehingga melihat pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Bima Tahap I tahun 2006 - 2010, dan masih perlunya penekanan kembali terhadap visi, misi, dan program tersebut, serta dengan tetap memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bima Tahun 2006 - 2025 yaitu "**Kabupaten Bima yang Maju, Sejahtera, Mandiri,**



Bermartabat, dan Religius melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, digerakan melalui serangkaian **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi, nilai tambah, kesempatan kerja, dan sarana prasarana penunjang perekonomian.
2. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar.
4. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan agama dan nilai-nilai sosial budaya bagi seluruh masyarakat.
5. Mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dalam mendukung percepatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah dan daya dukung lingkungan.
6. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance melalui pemberian Reward dan Punishment pada aparatur serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
7. Memantapkan dan meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjamin tegaknya supremasi hukum.
8. Memacu percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

2.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

2.2.1. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bima, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
2. Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kependudukan
4. Peningkatan Kesadaran, Pemahaman, dan Pengamalan Agama, serta nilai-nilai sosial budaya
5. Peningkatan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
6. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Supremasi Hukum.



8. Percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

2.2.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin dari 20,42% pada tahun 2010 menjadi 16,86% pada tahun 2015.
2. Tersedianya data base kemiskinan yang up to date dan berkelanjutan.
3. Terpadunya program-program penanggulangan kemiskinan di bawah koordinasi TKPKD.
4. Meningkatnya paritas daya beli masyarakat dari Rp. 622.200,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 794.102,- tahun 2015.
5. Berkembangnya investasi yang mendorong terciptanya lapangan kerja produktif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.
6. Berkembangnya industri yang berbasis pada potensi sumber daya lokal
7. Berkembangnya usaha perdagangan baik skala kecil, menengah, maupun besar
8. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penunjang perekonomian.
9. Meningkatnya kemitraan antar pelaku ekonomi.
10. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan memadai.
11. Tersedianya stok pangan masyarakat dan daerah setiap dibutuhkan.
12. Tersedianya penyediaan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.
13. Tersedianya informasi pasar yang *up-to date*.
14. Meningkatnya frekuensi promosi dan kerjasama antar daerah disektor pertanian peternakan, dan perikanan
15. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas alur distribusi pangan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
16. Tertatanya lalulintas ternak intra-wilayah maupun antar-wilayah dan proteksi terhadap pengusaha lokal serta pembinaan untuk meningkatkan daya saing dengan pengusaha dari luar.
17. Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan produktivitas produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
18. Penyediaan infrastruktur pendukung bidang pertanian.
19. Meningkatnya produksi dan kualitas pakan ternak untuk menjamin ketersediaan pakan sepanjang tahun.
20. Meningkatnya kesehatan hewan dan masyarakat verniter.



21. Terwujudnya peternakan integrasi dan populasi sapi 1 juta ekor pada tahun 2013, yang diawali dengan pemetaan wilayah penggembalaan sapi bali dan sapi blasteran.
22. Berkembangnya usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan.
23. Terlaksananya penyelenggaraan revitalisasi bidang pertanian dan perikanan.
24. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan.
25. Meningkatnya nilai tambah (*profit margin*) produk pertanian dan perikanan.
26. Meningkatnya akses pemasaran produk pertanian.
27. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kemandirian petani.
28. Meningkatnya produksi pangan dalam Hutan Kemasyarakatan (HKM).
29. Pemerataan tenaga pendidik ke seluruh wilayah Kabupaten Bima.
30. Meningkatnya angka melek huruf (terutama pada usia 15-24 tahun), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.
31. Tercapainya rasio Idealnya antara lokal/kelas dengan jumlah murid untuk SMP dan SMA serta meratanya sebaran dan jangkauan pelayanannya.
32. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil.
33. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini secara bertahap.
34. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu pendidikan (laboratorium, perpustakaan, olahraga, kesenian, dan lain-lain untuk kebutuhan intra dan ekstrakurikuler).
35. Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik baik ditingkat SD, SMP, maupun ditingkat SMA
36. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan.
37. Menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan gizi buruk.
38. Menekan penyebaran penyakit menular dan endemis lainnya di Kabupaten Bima.
39. Meningkatnya angka cakupan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan.
40. Tercapainya rasio yang Ideal antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
41. Tercapainya ratio yang ideal antara sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk.
42. Meningkatnya partisipasi masyarakat pada program Keluarga Berencana (KB)
43. Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi.
44. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.
45. Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan



46. disempurnakannya kebijakan kependudukan serta terlaksananya sosialisasi dan advokasi data dan proyeksi penduduk yang up to date.
47. Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama bagi seluruh masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas penerapan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitas kehidupan dan semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
48. Optimalnya peranan tokoh agama dan menguatnya kapasitas lembaga keagamaan dalam menata dan menjamin terselenggaranya kehidupan beragama yang berkualitas;
49. Meningkatnya akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai;
50. Menurunnya kasus-kasus amoral dan perbuatan melanggar norma agama lainnya;
51. Terjaminnya kerukunan hidup inter dan antar umat beragama;
52. Meningkatnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat terhadap dampak negatif globalisasi;
53. Meningkatnya prestasi generasi muda dalam berbagai bidang dan meningkatnya peran aktif generasi muda dalam setiap tahapan pembangunan daerah;
54. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak;
55. Meningkatnya kualitas hidup perempuan;
56. Meningkatnya peran perempuan dalam setiap tahapan pembangunan daerah;
57. Semakin tumbuh kembangnya budaya gotong-royong dalam masyarakat;
58. Meningkatnya even-even kesenian dan budaya lokal;
59. Meningkatnya pemanfaatan dan pengembangan seni dan budaya lokal/daerah;
60. Meningkatnya promosi kepariwisataan Kab. Bima;
61. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
62. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata, meningkatnya PAD, dan meningkatnya pendapatan masyarakat;
63. Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur pendukung kepariwisataan;
64. Terpeliharanya aset-aset pariwisata;
65. Meningkatnya jumlah investor bidang kepariwisataan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bima;
66. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama hari menginapnya di Kab. Bima;
67. Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kepariwisataan.
68. Menurunnya luas lahan kritis dan ilegal logging;



69. Terintegrasinya upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis;
70. Meningkatnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air;
71. Terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Bima yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah;
72. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
73. Antisipasi dini terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
74. Lestarnya keanekaragaman hayati hutan;
75. Menurunnya kasus-kasus kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang Kurang memperhatikan kelestarian lingkungan;
76. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya hutan;
77. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% atau lebih dari luas kawasan;
78. Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah abadi.
79. Tersedianya aparatur yang cukup dalam pengendalian dan pengawasan hutan;
80. Tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan hutan;
81. Terdapatnya batas yang jelas antara kawasan lindung dan budidaya;
82. Terlestarikannya keanekaragaman hayati ekosistem laut dan terumbu karang, seperti kawasan gilibanta dan sekitarnya;
83. Dipertahankannya kawasan peruntukan hutan bakau;
84. Menurunnya kerusakan lingkungan akibat pertambangan galian C;
85. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
86. Tersedianya regulasi tentang sistim penanganan bencana di Kabupaten Bima.
87. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah;
88. Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
89. Menurunnya kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang;
90. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
91. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah;
92. Tersedianya unit pelayanan terpadu.
93. Menurunnya angka kriminalitas, tindak kekerasan dan kejahatan;
94. Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah;
95. Menurunnya angka kriminalitas, tindak kekerasan/kejahatan, kasus sosial masyarakat dan pelanggaran HAM.
96. Terlaksananya percepatan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima di wilayah Woha, antara lain dengan mempercepat Penetapan Perda RTRW dan RDTR Ibu Kota Kabupaten Bima;
97. Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi;



98. Meningkatnya penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat Perkotaan dan Perdesaan;
99. Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan melalui penyehatan lingkungan perumahan pada Ibukota Kecamatan dan Perdesaan;
100. meningkatnya jumlah dan volume infrastruktur irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian;
101. Meningkatnya jumlah dan volume sarana air bersih dan sanitasi terutama pada wilayah-wilayah perdesaan;
102. Meningkatnya jumlah dan volume infrastruktur irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian;
103. Meningkatnya peran lembaga pengelolaan irigasi dalam peningkatan produksi pertanian;
104. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan;
105. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pada Desa Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan pasar kecamatan dan desa.

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bima tahun 2011 – 2015, Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan strategi dan arah kebijakan daerah sebagai berikut :

- 1) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mewujudkan **Misi 1** (Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi, nilai tambah, kesempatan kerja, dan sarana prasarana penunjang perekonomian) adalah sebagai berikut :
 1. Penyusunan Program dan kegiatan yang *Pro-Poor*.
 2. Pengembangan data kemiskinan yang *up-to-date* dan berkelanjutan.
 3. Pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 4. Pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis pada masyarakat miskin dan UMKM.
 5. Penciptaan iklim investasi yang sehat, kondusif dan berkesinambungan.
 6. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang perekonomian (pasar, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, infrastruktur perhubungan, energi dan komunikasi).
 7. Penguatan kelembagaan dan struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan kemitraan antara koperasi, swasta, dan BUMD, serta antara pengusaha besar, menengah, dan kecil.
- 2) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mewujudkan **Misi 2** (Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan) adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatkan ketersediaan, diversifikasi, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat.



2. Mencegah dan mengurangi laju konversi lahan produktif.
 3. pemanfaatan setiap lahan untuk keanekaragaman pangan di tingkat rumah tangga.
 4. Penyediaan informasi pasar yang up to date bagi para petani pelaku pasar.
 5. peningkatan kerjasama antar daerah di bidang pertanian.
 6. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan.
 7. Optimalisasi penataan lalu lintas ternak.
 8. Peningkatan kualitas, kuantitas dan produktivitas produk pertanian dan perikanan.
 9. Peningkatan infrastruktur pendukung bidang pertanian.
 10. Peningkatan produksi dan kualitas pakan ternak lokal.
 11. Peningkatan penanganan kesehatan hewan dan masyarakat verniter.
 12. Optimalisasi pelaksanaan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) Provinsi NTB di Kabupaten Bima.
 13. Optimalisasi usaha perikanan tangkap dan budidaya.
 14. Peningkatan adopsi teknologi di bidang pertanian dan perikanan serta penguatan kelembagaan petani/nelayan.
 15. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang memadai.
 16. Peningkatan nilai tambah (profit margin) produk pertanian dan perikanan.
 17. Peningkatan akses pemasaran produk pertanian Kabupaten Bima.
 18. Peningkatan permodalan usaha petani dan kuliatis serta fungsi kelembagaan petani.
 19. Optimalisasi pemanfaatan HKm sebagai sumber pangan masyarakat.
- 3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mewujudkan **Misi 3** (Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar) adalah sebagai berikut :
1. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik di daerah terpencil dan Penempatan tenaga pendidik berdasarkan asal yang bersangkutan.
 2. Optimalisasi program-program strategis bidang pendidikan, termasuk cikal bakal pendidikan tinggi negeri di Kabupaten Bima.
 3. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SLTP dan SLTA.
 4. Pengembangan pendidikan non formal.
 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk daerah terpencil.
 6. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan usia dini secara bertahap.
 7. Pengembangan Pendidikan Tinggi.
 8. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan
 9. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin.
 10. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak.
 11. Pengadaan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya
 12. Penanganan penyakit endemis tidak menular secara preventif dan kuratif.
 13. Promosi hidup bersih dan sehat.
 14. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.



15. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pelayanan KB.
 16. Bantuan Pelayanan KB gratis bagi masyarakat miskin.
 17. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang manfaat ber KB.
 18. Sosialisasi KB pria.
 19. KIE tentang kesehatan reproduksi pada remaja.
 20. Pembenahan sistem administrasi kependudukan.
 21. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola SIAK dan NIK.
 22. Pembenahan kebijakan kependudukan dan penataan sistem data base kependudukan.
- 4) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mewujudkan **Misi 4** (Meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan agama dan nilai-nilai sosial budaya bagi seluruh masyarakat) adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan keagamaan bagi generasi muda.
 2. Peningkatan peran tokoh agama, petugas keagamaan, takmir mesjid dan lain-lain, serta peningkatan peran lembaga keagamaan dalam menata dan menjamin terselenggaranya kehidupan beragama yang berkualitas.
 3. Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam aktifitas kehidupan sehari-hari.
 4. Pemberian bantuan bagi perbaikan sarana dan prasarana keagamaan.
 5. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar dan inter umat beragama.
 6. Penguatan identitas sosial dan budaya mbojo dengan pembinaan dan pengembangan secara lebih intensif.
 7. Peningkatan frekwensi pembinaan dan pemberdayaan generasi muda untuk turut serta dalam pembangunan daerah.
 8. Pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak.
 9. Pengembangan regulasi yang pro gender dalam pembangunan daerah.
 10. Pemberdayaan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
 11. Menciptkan iklim yang sehat bagi tumbuh kembangnya budaya partisipatif dan gotong-royong masyarakat.
 12. Mendorong tumbuh kembangnya berbagai kesenian dan kebudayaan lokal.
 13. Mendorong pemanfaatan dan pengembangan seni dan budaya lokal/daerah.
 14. Optimalisasi promosi potensi pariwisata Kabupaten Bima di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
 15. Mendorong peningkatan SDM pariwisata dari segi kualitas dan kuantitasnya.
 16. Mendorong investasi dalam pemanfaatan potensi pariwisata.
 17. Mendorong dan mengembangkan sarana prasarana infrastruktur pendukung kepariwisataan.
 18. Mendorong pemanfaatan aset pariwisata dalam kegiatan/event budaya.
 19. Mendorong dan mengembangkan destinasi kepariwisataan.
 20. Mendorong peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.
 21. Mendorong pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kepariwisataan.



- 5) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mewujudkan **Misi 5** (Mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dalam mendukung percepatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah dan daya dukung lingkungan) adalah sebagai berikut :
1. Penanaman kembali lahan-lahan yang sudah kritis yang dilanjutkan dengan pemeliharaan terhadap bibit yang sudah ditanam
 2. Penanganan lahan kritis secara terpadu guna pencegahan semakin meluasnya lahan kritis melalui peningkatan sosialisasi, pengawasan dan penindakan terhadap perusakan lingkungan, serta Penggunaan bibit yang tepat dan teknologi yang tepat dan waktu penanaman yang tepat (3 tepat) dalam penanganan lahan kritis.
 3. Penanganan kawasan resapan mata air.
 4. Memanfaatkan SDA secara optimal sesuai dengan tata ruang wilayah dan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
 5. Identifikasi dan pengembangan potensi SDA daerah.
 6. Peningkatan kualitas SDA dan LH.
 7. Pelestarian keanekaragaman hayati hutan melalui pengawasan yang lebih intensif.
 8. Optimalisasi pemantauan dan pengendalian eksploitasi SDA.
 9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya hutan.
 10. Penetapan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
 11. Penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan sawah abadi.
 12. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pengendali dan pengawas hutan.
 13. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan sumber daya Hutan.
 14. Pembuatan Pal Batas kawasan Lindung dan budidaya.
 15. Pelestarian ekosistem, pesisir dan laut.
 16. Kebijakan Keenam belas, Pelestarian ekosistem hutan bakau.
 17. Pengawasan dan penertiban pertambangan galian golongan C.
 18. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terutama di wilayah-wilayah pusat pertumbuhan seperti Sape, Tente, dan Bolo.
 19. Penyusunan perencanaan tentang penanganan bencana.
- 6) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mewujudkan **Misi 6** (Menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui pemberian *Reward* dan *Punishment* pada aparatur serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel) adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Profesionalisme dan kinerja aparatur.
 2. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.
 3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan aparatur.
 4. Perbaiki sistem dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.



5. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
 6. Mendorong penerapan sistem pelayanan satu atap.
- 7) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mewujudkan **Misi 7** (Memantapkan dan meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjamin tegaknya supremasi hukum) adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perundang-undangan, melalui peningkatan frekuensi dan cakupan wilayah sosialisasi perundang-undangan.
 2. Meningkatkan ketersediaan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas dan kelengkapan perangkat aturan yang diterapkan dalam menindak kasus kejahatan dan pelanggaran HAM.
 3. Penurunan angka kriminalitas, tindak kekerasan/kejahatan, kasus sosial masyarakat dan pelanggaran HAM yang ditandai dengan menurunnya angka kasus kejahatan dan pelanggaran HAM serta meningkatnya kuantitas operasi tertib di wilayah hukum Kabupaten Bima.
 4. Peningkatan Efektifitas Penegakan Perda melalui pembinaan kadarkum dan menambah jumlah PPNS.
- 8) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka mewujudkan **Misi 8** (Memacu percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh) adalah sebagai berikut :
1. Memacu terlaksananya pembangunan Ibukota Kabupaten Bima di Wilayah Woha.
 2. Memberikan prioritas pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ke kawasan-kawasan strategis.
 3. Pengembangan infrastruktur irigasi berdasarkan potensi wilayah.
 4. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi.
 5. Menjalinkan kerjasama dengan penyedia jasa telekomunikasi dan energi untuk mengembangkan jaringannya serta mengembangkan energi alternatif untuk wilayah-wilayah yang sangat terpencil.

2.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bima, maka prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan selama kurun waktu 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan perluasan lapangan kerja melalui pengembangan komoditas unggulan.
2. Peningkatan Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan.
3. Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.



4. Peningkatan Penerimaan daerah melalui optimalisasi pengelolaan PAD dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.
5. Penataan sistem ketahanan pangan daerah.
6. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan, penuntasan buta aksara dan putus sekolah.
7. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB.
8. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama.
9. Penataan Strategi Penanggulangan Bencana.
10. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.
11. Pembangunan infrastruktur strategis (a.l. penuntasan penanganan jalan dan jembatan, sumber daya air/irigasi, dll).
12. Pengembangan Tata Kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip good governance.
13. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
14. Percepatan Pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bima di Wilayah Woha.

2.5. **Indikator Kinerja Utama**

Rekomendasi yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Bima terkait perencanaan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi adalah perumusan tujuan dan sasaran dalam perencanaan kinerja tahunan maupun lima tahunan agar lebih terukur dan berorientasi hasil, maka pada tanggal 16 – 18 Juli 2013 telah dilakukan reuiu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hasil kerjasama Bappeda Kabupaten Bima dengan AIPD (LPPM Universitas Brawijaya Malang). Hasil reuiu berdampak pada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bima, maka pada tanggal 7 Pebruari 2015 ditetapkan Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bima.

Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bima

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|--|---|
| 1. Menurunnya jumlah penduduk miskin | Prosentase penurunan jumlah penduduk miskin |
| 2. Meningkatnya paritas daya beli masyarakat | Paritas daya beli |
| 3. Peningkatan PDRB Per Kapita : | a. PDRB ADHK b. PDRB ADHB |
| 4. Menurunnya jumlah pengangguran melalui peningkatan ketersediaan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat | Prosentase penurunan jumlah pengangguran |
| 5. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana | a. Rehabilitasi Terminal |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|--|
| penunjang perekonomian | b. Pembuatan Halte c. Rehabilitasi Jembatan Timbang |
| 6. Meningkatnya ketersediaan stok pangan | a. Jumlah stok pangan Rumah Tangga b. Jumlah konsumsi pangan bergizi masyarakat Bima (Skor pola pangan harapan) c. Meningkatnya jumlah produksi Beras |
| 7. Terwujudnya peternakan integrasi Dalam mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS) | Jumlah Ternak : a. Sapi b. Kerbau c. Kuda d. Kambing e. Unggas |
| 8. Berkembangnya usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan | a. Jumlah usaha perikanan tangkap dan budidaya b. Jumlah Produksi perikanan tangkap dan budidaya |
| 9. Meningkatnya angka melek huruf (terutama pada usia 15-24 tahun), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni | a. Meningkatnya angka melek huruf b. Meningkatnya rata-rata lama sekolah c. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) : - APK SD - APK SMP - APK SMA d. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM): - APK SD - APM SMP - APM SMA |
| 10. Tercapainya rasio ideal antara lokal/kelas dengan jumlah murid serta meratanya sebaran dan jangkauan pelayanannya | Meningkatnya rasio lokal/kelas dengan jumlah murid : - SD/MI - SMP/MTs - SMP/MTs |
| 11. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini secara bertahap | Jumlah sarana dan prasarana PAUD |
| 12. Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik baik ditingkat SD, SMP, maupun ditingkat SMA | a. Jumlah guru yang mengikuti diklat peningkatan mutu b. Jumlah guru yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi |
| 13. Meningkatnya usia harapan hidup | Usia harapan hidup |
| 14. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan | Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (rawat jalan di PKM dan jaringannya) |
| 15. Menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan kasus gizi buruk | a. Menekan angka kematian bayi b. Menekan angka kematian balita c. Menekan angka prevalensi malnutrisi anak (Jumlah Kasus Gizi Buruk) d. Menekan angka kasus gizi buruk terutama pada anak-anak (kasus gizi buruk yang meninggal) e. Menekan setengah angka kematian ibu melahirkan f. Meningkatnya cakupan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih |
| 16. Menekan penyebaran penyakit menular dan endemis lainnya di Kabupaten Bima | a. Menekan prevalensi malaria b. Menekan prevalensi TBC |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|--|
| 17. Meningkatnya angka cakupan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan. | a. Meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) b. Meningkatkan akses terhadap sumber air bersih |
| 18. Tercapainya rasio yang Ideal antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk | Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk |
| 19. Tercapainya rasio yang ideal antara sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk | Rasio sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk |
| 20. Meningkatnya partisipasi masyarakat pada program Keluarga Berencana (KB) | a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk b. Meningkatnya Akseptor KB Aktif |
| 21. Terciptanya tertib administrasi kependudukan | Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran) |
| 22. Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan | Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan SIAK dan NIK. |
| 23. Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama bagi seluruh masyarakat | Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bima yang menunaikan ibadah haji |
| 24. Meningkatnya akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai | a. Meningkatnya jumlah sarana dan sarana peribadatan b. Meningkatnya jumlah Taman Pendidikan Al - Qur'an (TPA) c. Meningkatnya jumlah majelis taklim |
| 25. Menurunnya kasus-kasus amoral dan perbuatan melanggar norma agama dan sosial kemasyarakatan lainnya | Menurunnya jumlah kasus Pemerkosaan, Perzinahan, dan Perjudian |
| 26. Meningkatnya even-even kesenian dan budaya lokal | Jumlah kegiatan kesenian dan budaya lokal |
| 27. Meningkatnya promosi kepariwisataan Kab. Bima | Jumlah kegiatan Promosi pariwisata |
| 28. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama hari menginapnya di Kab. Bima | jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara |
| 29. Menurunnya luas lahan kritis, perladangan liar dan ilegal logging | a. Menurunnya kasus perladangan liar b. Menurunnya kasus Ilegal Logging c. Menurunnya Luas lahan kritis |
| 30. Meningkatnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air | Minimal dipertahankannya Jumlah Titik Mata Air dan Debit Mata Air |
| 31. Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan | Jumlah Dokumen Lingkungan : Amdal, UKL-UPL dan SPPL |
| 32. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30% atau lebih dari luas kawasan | Dipertahankannya Luas Ruang Terbuka Hijau |
| 33. Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah abadi | Luas Peruntukan Lahan Sawah Abadi |
| 34. Tersedianya aparatur yang cukup dalam pengendalian dan pengawasan hutan | Tersedianya aparatur |
| 35. Tersedianya Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan | Peraturan Daerah |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|---|
| 36. Terdapatnya batas yang jelas antara kawasan lindung dan budidaya | Luas kawasan hutan |
| 37. Dipertahankannya kawasan peruntukan hutan bakau | Luas hutan bakau |
| 38. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah | a. Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) b. Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) |
| 39. Tersedianya regulasi tentang sistim penanganan bencana di Kabupaten Bima | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang sistim penanganan bencana |
| 40. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah | a. Terselenggaranya Diklat baik gelar maupun non gelar dalam rangka Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur b. Tersusunnya dan terimplementasinya Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD |
| 41. Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. | Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat di seluruh SKPD |
| 42. Menurunnya kasus - kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang | Berkurangnya jumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang |
| 43. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel | Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dalam pengelolaan keuangan daerah |
| 44. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah | Meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |
| 45. Tersedianya unit pelayanan terpadu | Terbentuknya unit pelayanan terpadu dan berkembangnya sistem pelayanan satu atap |
| 46. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap per-UU | a. Meningkatnya frekuensi sosialisasi produk perundang-undangan b. Meningkatnya cakupan wilayah sosialisasi produk perundang-undangan |
| 47. Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah | a. Meningkatnya jumlah Perda yang dihasilkan b. Menurunnya angka kriminilitas, tindak kekerasan/kejahatan |
| 48. Terlaksananya percepatan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima di wilayah Woha | a. Terlaksananya pemindahan Ibukota Kabupaten Bima b. Terlaksananya pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahan c. Terbangunnya infrastruktur jalan pada ibukota Kabupaten d. Terbangunnya infrastruktur jembatan pada ibukota Kabupaten e. Terbangunnya infrastruktur utilitas drainase pada ibukota Kabupaten |
| 49. Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi | a. Terbangunnya pelabuhan perintis/Cargo, Pelabuhan Nusantara b. Terbangunnya pelabuhan tradisional c. Terbangunnya jembatan pada ruas jalan propinsi dan kabupaten |
| 50. Meningkatnya jumlah dan volume infrastruktur irigasi dalam rangka peningkatan produksi | a. Terbangunannya Bendung, Bendungan, Dam, beririgasi teknis |



| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) |
|---|---|
| pertanian | <ul style="list-style-type: none"> b. Terpelihara bangunan dan bangunan pelengkap pada daerah irigasi semi teknis/semi permanen c. Terbangunnya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier d. Terpeliharaanya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier |
| 51. Meningkatnya peran lembaga pengelolaan irigasi dalam peningkatan produksi pertanian | Terbentuknya Kelembagaan petani (P3A, GP3A, dan LEPLI) |
| 52. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim yang sehat untuk investasi | Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat |
| 53. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pada Desa Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan pasar kecamatan dan desa | Terbangunnya pasar kecamatan / desa yang akan melayani kebutuhan bagi masyarakat pada lokasi dan Hinterlandnya. |

Sumber : Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, 2015

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Pemerintah Kabupaten Bima menyusun Perjanjian Kinerja Kabupaten Bima tahun 2015 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2011 - 2015, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 dan dokumen Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bima.

Adapun sasaran dan indikator kinerja serta target dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015 meliputi :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kabupaten Bima Tahun 2015

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------------|
| 1 | Menurunnya jumlah penduduk miskin | 1 Prosentase penurunan jumlah penduduk miskin | % | 16.86 |
| 2 | Meningkatnya paritas daya beli masyarakat | 2 Paritas daya beli | Rp. | 794.102 |
| 3 | Peningkatan PDRB Per Kapita : | 3 Pendapatan perkapita ADHK | Rp. | 9,707,751.89 |
| | | 4 Pendapatan perkapita ADHB | Rp. | 3,977,365.75 |
| 4 | Menurunnya jumlah pengangguran melalui peningkatan ketersediaan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat | 5 Prosentase penurunan jumlah pengangguran | % | 1.38 |
| 5 | Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penunjang perekonomian | 6 Rehabilitasi Terminal | Unit | 18 |
| | | 7 Pembuatan Halte | Unit | 18 |
| | | 8 Rehabilitasi Jembatan Timbang | Unit | 1 |
| 6 | Meningkatnya ketersediaan stok pangan | 9 Jumlah Stok Pangan Rumah Tangga | Ton | 69.559 |
| | | 10 Jumlah konsumsi pangan bergizi | Ton | 70.282 |



| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------------------|-----------|
| | | masyarakat Bima (Skor pola pangan harapan) | | |
| | | 11 Meningkatnya jumlah produksi Beras | % | 282.130 |
| 7 | Terwujudnya peternakan integrasi Dalam mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS) | 12 Jumlah ternak : | | |
| | | - sapi | Ekor | 171,432 |
| | | - Kerbau | Ekor | 23,072 |
| | | - Kuda | Ekor | 8,740 |
| | | - Kambing | Ekor | 359,811 |
| | | - Unggas | Ekor | 1,401,367 |
| 8 | Berkembangnya usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan | 13 Jumlah usaha perikanan tangkap dan budidaya | Ton | 67.9 |
| | | 14 Jumlah Produksi perikanan tangkap dan budidaya | Ton | 361,022 |
| 9 | Meningkatnya angka melek huruf (terutama pada usia 15-24 tahun), rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni | 15 Meningkatnya angka melek huruf | % | 100 |
| | | 16 Meningkatnya rata-rata lama sekolah | Tahun | 12 |
| | | 17 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) : | | |
| | | - APK SD | % | 105.63 |
| | | - APK SMP | % | 100 |
| | | - APK SMA | % | 100 |
| | | 18 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) : | | |
| | | - APM SD | % | 100 |
| | | - APM SMP | % | 100 |
| | | - APM SMA | % | 100 |
| 10 | Tercapainya rasio ideal antara lokal/kelas dengan jumlah murid serta meratanya sebaran dan jangkauan pelayanannya | 19 Meningkatnya rasio lokal/kelas dengan jumlah murid : | | |
| | | - SD/MI | % | 31 |
| | | - SMP/MTs | % | 32 |
| | | - SMA | % | 32 |
| 11 | Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini secara bertahap | 20 Jumlah sarana dan prasarana PAUD | Unit | 384 |
| 12 | Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik baik ditingkat SD, SMP, maupun ditingkat SMA | 21 Jumlah guru yang mengikuti diklat peningkatan mutu | % dari jumlah guru | 49.43 |
| | | 22 Jumlah guru yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi | % dari jumlah guru | 1.32 |
| 13 | Meningkatnya usia harapan hidup | 23 Usia harapan hidup | Tahun | 72.54 |
| 14 | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan | 24 Meningkatnya angka kunjungan masyarakat ke sarana dan prasarana pelayanan kesehatan (rawat jalan di PKM dan jaringannya) | Orang | 300.987 |
| 15 | Menurunnya angka kematian bayi, angka | 25 Menekan angka kematian bayi | Kasus | 18 |
| | | 26 Menekan angka kematian balita | Kasus | 10 |



Pemerintah Kabupaten Bima
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|---|--------|--------|
| | kematian ibu, dan kasus gizi buruk | 27 Menekan angka prevalensi malnutrisi anak | % | 14.51 |
| | | 28 Menekan angka kasus gizi buruk terutama pada anak-anak | Kasus | 30 |
| | | 29 Menekan setengah angka kematian ibu melahirkan | Kasus | 5 |
| | | 30 Meningkatnya cakupan kelahiran yang ditolong tenaga terlatih | % | 100 |
| 16 | Menekan penyebaran penyakit menular dan endemis lainnya di Kabupaten Bima | 31 Menekan prevalensi malaria | % | 5.5 |
| | | 32 Menekan prevalensi TBC | Kasus | 181 |
| 17 | Meningkatnya angka cakupan air bersih, sanitasi dan penyehatan lingkungan. | 33 Meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) | % | 100 |
| | | 34 Meningkatkan akses terhadap sumber air bersih | % | 100 |
| 18 | Tercapainya rasio yang Ideal antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk | 35 Jumlah tenaga kesehatan | Orang | 626 |
| 19 | Tercapainya rasio yang Ideal antara sarana pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk | 36 Jumlah sarana pelayanan kesehatan | Unit | 727 |
| 20 | Meningkatnya partisipasi masyarakat pada program Keluarga Berencana (KB) | 37 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1.00 |
| | | 38 Meningkatnya Akseptor KB Aktif | PUS | 76.99 |
| 21 | Terciptanya tertib administrasi kependudukan | 39 Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran) | % | 96.92 |
| 22 | Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan | 40 Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan SIAK dan NIK. | Orang | 38 |
| 23 | Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kualitas pengamalan ajaran agama bagi seluruh masyarakat | 41 Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bima yang menunaikan ibadah haji | Orang | 524 |
| 24 | Meningkatnya akses untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai | 42 Meningkatnya jumlah sarana dan sarana peribadatan | Unit | 1.393 |
| | | 43 Meningkatnya jumlah Taman Pendidikan Al -Qur'an (TPA) | Unit | 1.03 |
| | | 44 Meningkatnya jumlah majelis taklim | lokasi | 191 |
| 25 | Menurunnya kasus-kasus amoral dan perbuatan melanggar norma agama | 45 Menurunnya jumlah kasus Pemerkosaan, Perzinahan, dan Perjudian | Kasus | 0 |



Pemerintah Kabupaten Bima
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|--|------------|-----------|
| | dan sosial kemasyarakatan lainnya | | | |
| 26 | Meningkatnya even-even kesenian dan budaya lokal | 46 Jumlah kegiatan kesenian dan budaya lokal | Keg | 5 |
| 27 | Meningkatnya promosi kepariwisataan Kab. Bima | 47 Jumlah kegiatan Promosi pariwisata | Keg | 5 |
| 28 | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan lama hari menginapnya di Kab. Bima | 48 jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara | Orang | 6,308 |
| 29 | Menurunnya luas lahan kritis, perladangan liar dan ilegal logging | 49 Menurunnya Luas lahan kritis | Ha | 61,098.84 |
| | | 50 Menurunnya kasus perladangan liar | Kasus | 0 |
| | | 51 Menurunnya kasus Ilegal Logging | Kasus | 0 |
| 30 | Meningkatnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air | 52 Minimal dipertahankannya Jumlah Titik Mata Air dan Debit Mata Air | Titik, M3 | 41 |
| 31 | Optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan | 53 Jumlah Dokumen Lingkungan : Amdal, UKL-UPL dan SPPL | Dok. AMDAL | 11 |
| 32 | Tersedianya Ruang Terbuka Hijau sebanyak 30% atau lebih dari luas kawasan | 54 Dipertahankannya Luas Ruang Terbuka Hijau | Ha | 140.79 |
| 33 | Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah abadi | 55 Luas Sawah Abadi | Ha | 1,262 |
| 34 | Tersedianya aparatur yang cukup dalam pengendalian dan pengawasan hutan | 56 Tersedianya aparatur | Org | 26 |
| 35 | Tersedianya Peraturan Daerah tentang pengelolaan hutan | 57 Peraturan Daerah | Dok | 1 |
| 36 | Terdapatnya batas yang jelas antara kawasan lindung dan budidaya | 58 Luas kawasan hutan | Ha | 83,189,91 |
| 37 | Dipertahankannya kawasan peruntukan hutan bakau | 59 Luas hutan bakau | Ha | 621.22 |
| 38 | Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah | 60 Jumlah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) | Unit | 1 |
| | | 51 Jumlah TPS (Tempat Pembuangan Sementara) | Unit | 6 |
| 39 | Tersedianya regulasi tentang sistim | 62 Tersusunnya Peraturan Daerah tentang sistim penanganan | Dok | 1 |



| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|--|--|--------|--------|
| | penanganan bencana di Kabupaten Bima | bencana | | |
| 40 | Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pemerintah Daerah | 63 Terselenggaranya Diklat baik gelar maupun non gelar dalam rangka Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | Orang | 645 |
| | | 64 Tersusunnya dan terimplementasinya Standar Pelayanan Minimal di setiap SKPD | Unit | 15 |
| 41 | Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. | 65 Terbentuknya unit pengelola pengaduan masyarakat di seluruh SKPD | Unit | 12 |
| 42 | Menurunnya kasus - kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang | 66 Berkurangnya jumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang | Kasus | 1 |
| 43 | Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel | 67 Meningkatnya kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dalam pengelolaan keuangan daerah | Dok | WTP |
| 44 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah | 68 Meningkatnya jumlah usulan masyarakat yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | % | 45 |
| 45 | Tersedianya unit pelayanan terpadu | 69 Pelayanan perizinan terpadu | Unit | 1 |
| 46 | Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap per- UU | 70 Meningkatnya frekuensi sosialisasi produk perundang-undangan | Kali | 10 |
| | | 71 Meningkatnya cakupan wilayah sosialisasi produk perundang-undangan | Kec. | 18 |
| 47 | Meningkatnya ketersediaan produk hukum daerah | 72 Meningkatnya jumlah Perda yang dihasilkan | Buah | 18 |
| | | 73 Menurunnya angka kriminlitas, tindak kekerasan/kejahatan | Kasus | 490 |
| 48 | Terlaksananya percepatan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima di wilayah Woha | 74 Terlaksananya pemindahan Ibukota Kabupaten Bima | Paket | 1 |
| | | 75 Terlaksananya pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahan | Ha | 20 |
| | | 76 Terbangunnya infrastruktur jalan pada ibukota Kabupaten | Km | 11 |
| | | 77 Terbangunnya infrastruktur jembatan pada ibukota Kabupaten | Buah | 1 |
| | | 78 Terbangunnya infrastruktur utilitas drainase pada ibukota | Km | 1 |



| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|-----|---|--|--------|---------|
| | | Kabupaten | | |
| 49 | Meningkatnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan strategis melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi | 79 Terbangunnya pelabuhan perintis/Cargo, Pelabuhan Nusantara | Buah | 1 |
| | | 80 Terbangunnya pelabuhan tradisonal | Buah | 6 |
| | | 81 Terbangunnya jembatan pada ruas jalan propinsi dan kabupaten | Buah | 84 |
| 50 | Meningkatnya jumlah dan volume infrastruktur irigasi dalam rangka peningkatan produksi pertanian | 82 Terbangunannya Bendung, Bendungan, Dam, beririgasi teknis | Buah | 61 |
| | | 83 Terpelihara bangunan dan bangunan pelengkap pada daerah irigasi semi teknis/semi permanen | Unit | 60 |
| | | 84 Terbangunnya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier | Km | 326.39 |
| | | 85 Terpeliharanya jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier | Km | 326.89 |
| 51 | Meningkatnya peran lembaga pengelolaan irigasi dalam peningkatan produksi pertanian | 86 Terbentuknya Kelembagaan petani (P3A, GP3A, dan LEPLI) | Buah | 338 |
| 52 | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi dalam rangka menciptakan iklim yang sehat untuk investasi | 87 Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat | KK | 119,004 |
| 53 | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pada Desa Pusat Pertumbuhan melalui pembangunan pasar kecamatan dan desa | 88 Terbangunnya pasar kecamatan / desa | Unit | 10 |

Sumber : Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 1